

**BAB IV.**  
**ANALISA PENGARUH KONSTRUKSI *SPEECH ACTS***  
**OLEH *RULLING CLASS* MYANMAR TERHADAP**  
**IMPLEMENTASI DOKTRIN R2P**

Pada bagian empat akan membahas substansi utama dari penelitian ini. Didalamnya akan menganalisa *Speech acts* yang ditampilkan oleh *Rulling Class* Myanmar seperti Junta Militer dan Aung San Suu Kyi, serta kelompok Budha Nasionalis melalui pidato-pidato nya dalam merespon tekanan global mengenai komitmen politik Myanmar untuk menerapkan R2P pada Krisis Rohingya. Bagian ini juga akan menggambarkan bagaimana konstruksi *Speech Acts* dan dampaknya terhadap upaya implementasi *RtoP* oleh Komunitas Internasional seperti PBB.

A. Analisa Pidato Aung San Suu Kyi, Pimpinan Militer Myanmar, dan tokoh Budha Nasionalis dalam Merespon Tekanan Global pada Krisis Rohingya.

Teori konstruktivisme meyakini bahwa politik internasional merupakan hasil proses interaksi antar *agents* (*Rulling Class*) yang dibentuk oleh kepentingan, identitas, intensi, dan simbol linguistik yang membentuk struktur pertemanan atau rivalitas, terutama dalam proses pembuatan kebijakan (Onuf, 1998). Seluruh aspek tersebut kemudian dapat dianalisa dari *Speech acts* para agen/aktor.

*Speech acts* atau tindak tutur, merupakan bahan mentah yang orisinalitasnya dapat dipercayai karena tidak mencabut bagian-bagian abstrak yang terdapat dari konten. Bentuk-bentuk *speech acts* dapat berupa komunikasi, pidato, dialog, *statement*, dan bentuk lainnya yang bersifat komunikatif. Berbeda dengan

‘bahan jadi’ yang berbentuk dokumen-dokumen. (Hadiwinata, 2017).

Dalam diskursi politik, untuk mempertimbangkan kebijakan apa yang ingin diadopsi dan kebijakan apa yang tidak, *speech acts* atau tindak tutur dianggap sangat memengaruhi. Hal ini dikarenakan para agen akan menggunakan tindak tutur yang tidak hanya menggunakan kekuatan komunikatif, tetapi aspek-aspek lainnya seperti *power* dari agen untuk melakukan *bargaining*. Disamping itu, *speech acts* juga digunakan untuk menganalisa intensi dari para agen terhadap suatu fenomena tertentu didalam mengambil keputusan-keputusan. *Speech acts* yang kemudian mengkonstruksi pemahaman tertentu dari intensi agen tersebut yang berpengaruh pada kebijakan publik.

Pada krisis Rohingya, proses implementasi *Responsibility to Protect* sebagai upaya menghentikan kekerasan terhitung sangat lambat. Dalam hal ini, dengan menggunakan gagasan konstruktivisme mengenai *speech acts*, penulis mengasumsikan bahwa faktor signifikan penyebab lambannya proses implementasi R2P ialah karena minimnya komitmen dari para *agents* pembuat kebijakan di Myanmar untuk menerapkan doktrin tersebut. yang tercerminkan dari *speech acts* yang mereka tampilkan.

Hal ini dapat dianalisa dari *speech acts* berupa pidato, dialog dan komunikasi yang dilakukan oleh para *agents* atau *rulling class* Myanmar dalam merespon tekanan global untuk segera menghentikan kekerasan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya dan menyelesaikan krisis tersebut. Aktor yang memiliki *power* dan peran signifikan dalam proses demokratisasi tatanan pemerintah Rohingya ialah Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin *de facto Myanmar* sekaligus peraih nobel perdamaian dan penghargaan lainnya atas jasanya dalam memperjuangkan HAM di Myanmar.

Kemudian Junta Militer Myanmar yang memiliki peran vital dalam konstitusi negara Myanmar, dan juga kelompok Budha Nasionalis sebagai anggota masyarakat yang memainkan peran penting dalam kebijakan-kebijakan Myanmar.

1. *Speech Acts* oleh Aung San Suu Kyi mengenai Rohingya

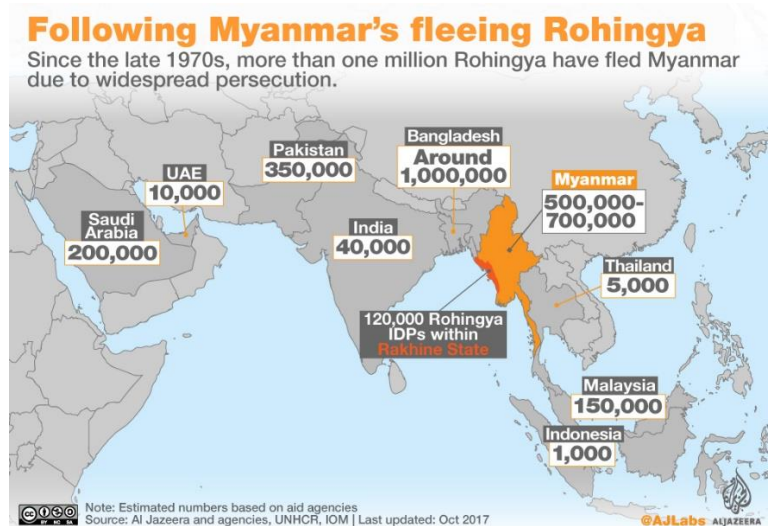
Aung San Suu Kyi dikenal atas dasar perjuangan dan pengorbanannya dalam melepaskan Myanmar dari cengkraman Tirani. Oleh karena itu, Suu Kyi dianggap sebagai pahlawan HAM oleh masyarakat Myanmar. Namun pada kasus Rohingya, Suu Kyi mendapat banyak tekanan dan kritik karena sikapnya yang terkesan dingin dan menolak untuk merespon tekanan global atas kekerasan kemanusiaan yang dialami oleh Rohingya. Padahal sejatinya, Suu Kyi pada pidato penghargaan nobel perdamaianya lebih dari 20 tahun lalu di Oslo secara tegas dan eksplisit menyampaikan bahwa Ia berjanji untuk berupaya menciptakan dunia khususnya Burma yang bebas dari *displaced, homeless, hopeless person*.

*“Had drawn the attention of the world to the struggle for democracy and human rights in Burma (Myanmar). Burma is a country of many ethnic nationalities and faith in its future can be founded only on a true spirit of union. Ultimately our aim should be to create a world free from the displaced, the homeless, and the hopeless, a world of which each and every corner is a true sanctuary where the inhabitants will have the freedom and the capacity to live in a peace”* (BBC, 2018).

Pada tahun yang sama ketika Suu Kyi menyampaikan pidato tersebut, terjadi eskalasi konflik dan kekerasan komunal di Myanmar yang menyebabkan 100.000 Rohingya terlantar, dan

setidaknya 200 orang terbunuh (BBC,2018). Kekerasan dan konflik kian mengalami eskalasi pada tahun-tahun selanjutnya.

Gambar 4.1. : Muslim Rohingya yang meninggalkan Myanmar sejak 1970



Sumber: Al-Jazeera, 2017

Pada pidatonya di Singapura, Suu Kyi menolak untuk mengakui kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan oleh militer. Justru, Suu Kyi membenarkan kampanye pemerintahnya untuk mengepung komunitas muslim di bagian Rakhine.

*“We, who are living through the transition in Myanmar, view it differently than those who observe it from the outside and who will remain untouched by its outcome,”* (Al-Jazeera, 2018). jawab Suu Kyi, pada saat merespon kritik tentang pemerintahannya pada kasus Rohingya.

Suu Kyi menambahkan bahwa penyebab konflik dan kekerasan di Rakhine ialah karena aksi terorisme. Ia menjustifikasi tindakan dan kampanye

militer Myanmar karena menurutnya hal tersebut dapat menjadi ancaman nasional.

*“The danger of Terrorist activities which was the initial cause of events leading to the humanitarian crisis in Rakhine remains real and present today. Unless this security challenge is addressed, the risk of intercommunal violence will remain. It is a threat that could have grave consequences, not just for Myanmar but also for the countries in our region and beyond.”* Respon Suu Kyi terhadap situasi di Rohingya (VoA 2018).

Dalam kesempatan lainnya pada saat berpidato di Majelis Umum PBB, Suu Kyi kembali memberikan pidato kontroversial. Dimana substansi dan fakta-fakta dari apa yang disampaikan Suu Kyi di Rakhine tidak terbukti benar dan terkesan menutupi apa yang sebenarnya terjadi terhadap muslim Rohingya.

*“It is not the intention of the Myanmar government to apportion blame or to abnegate responsibility. We condemn all human rights violations and unlawful violence.”* (Guardian, 2017).

Apabila dilihat dari fakta statement Suu Kyi tersebut, pemerintah dan media di Myanmar secara berulang kali menyebutkan bahwa penyebab apa yang terjadi di Rakhine ialah karena aksi teroris-ekstrim. Pemerintah Myanmar tidak pernah mengutuk aksi kekerasan komunal yang dilakukan oleh pihak militer maupun Buddha-nasionalis terhadap komunitas muslim Rohingya di Rakhine (Holmes, 2017).

*“Since 5 September, there have been no armed clashes and there have been no clearance operations. All people living in the Rakhine state have access to education and healthcare services without discrimination”* (The Guardian, 2017).

Suu Kyi memaparkan bahwa kontak senjata sudah tidak terjadi semenjak 5 September 2017. Padahal faktanya, terjadi kontak senjata sejak 5 September. Bahkan kantor resmi Aung San Suu Kyi melalui halaman Facebook nya melaporkan bahwa pihak keamanan telah melakukan “*Clearance Operations*” semenjak saat itu (Holmes, 2017). Disamping itu, tidak semua orang di Rakhine memiliki akses seperti yang disebutkan oleh Suu Kyi. Hampir semua orang Rohingya tidak diakui kewarganegaraannya dan tidak memiliki akses terhadap Lembaga-lembaga pemerintahan di Myanmar.

Akses untuk kesehatan sangat terlarang untuk Rohingya. Kebanyakan dari Rohingya dilarang untuk bersekolah atau kuliah, terutama orang-orang Rohingya yang tinggal di kamp penampungan internal dimana mereka membutuhkan izin khusus untuk pergi (Holmes, 2017).

*Speech acts* atau tindak tutur yang ditampilkan oleh Suu Kyi dalam merespon tekanan dan kritik global menggambarkan minimnya komitmen pemerintah Myanmar dalam proses penyelesaian kekerasan komunal yang dihadapi oleh komunitas muslim Rohingya di Myanmar. Doktrin *Responsibility to Protect* pada pilarnya yang pertama menegaskan peran Negara sebagai pihak yang harus bertanggungjawab terhadap keselamatan rakyatnya. Dalam proses penyelesaian konflik melalui doktrin R2P, dibutuhkan adanya komitmen negara yang kuat selain bantuan kemanusiaan dari komunitas internasional.

*Speech acts* yang ditampilkan pemerintah Suu Kyi sebagai pemimpin *de facto Myanmar* mengkonstruksikan paham kepada komunitas internasional, bahwa Myanmar tidak berada dalam pihak untuk menerima Rohingya sebagai warga negara. Bahkan komunitas muslim ini dianggap sebagai suatu ancaman nasional atau teroris ekstrim sebagai

penyebab kerusuhan di negara bagian Rakhine. Sehingga munculnya istilah seperti “*Clearance operation*” atau operasi pembersihan untuk keamanan nasional, dengan menjadikan muslim Rohingya sebagai target subjek operasi tersebut.

Minimnya komitmen Myanmar yang dapat dianalisa dari *speech acts* menyebabkan R2P terkesan tidak signifikan perannya dalam proses menemukan solusi atas apa yang terjadi di Rakhine. Karena berdasarkan pilar-pilar R2P pada perjanjian tahun 2005, R2P melalui komunitas internasional membutuhkan peran negara untuk menyelesaikan isu *atrociti crimes* pada negara yang bersangkutan.

## 2. *Speech Acts* oleh Junta Militer Myanmar mengenai Rohingya

Disamping Aung San Suu Kyi, junta militer Myanmar memainkan peran vital pada krisis Rohingya. Junta militer, berkali-kali melalui pernyataannya menganggap bahwa Rohingya bukan merupakan bagian dari Myanmar, serta dianggap sebagai ancaman nasional. Pada konferensi pers di ibukota Myanmar, Naypyitaw, juru bicara pemerintah Myanmar Zaw Htay mengatakan bahwa Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan para anggota cabinet lainnya bertemu dengan para pemimpin militer, termasuk kepala militer Min Aung Hlaing. Mereka bersepakat menginstruksikan militer untuk melancarkan operasi untuk menumpas para teroris (Birsel, 2019).

Pemimpin militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, menegaskan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan pelanggaran dan penganiayaan terhadap etnis Rohingya. Ia menyangkal segala tuduhan mengenai *systematic army persecution* terhadap etnis muslim tersebut, hal ini disampaikannya ketika melakukan wawancara dengan media jepang Asahi Shimbun di Tokyo (Wang, 2019).

Klaim yang disampaikan Min Aung Hlaing bertolak belakang dengan keterangan-keterangan dari para pengungsi Rohingya. Laporan PBB yang dirilis September 2018 juga membeberkan tindak kekejaman yang dilakukan militer Myanmar secara detail. Disebutkan dalam laporan tersebut bahwa adanya upaya genosida dan pembantaian etnis di Myanmar.

Disamping menolak tuduhan-tuduhan mengenai operasi pembersihan terhadap Rohingya, Aung Hlaing juga mengomentari desakan penyidik PBB untuk membawa petinggi militer Myanmar soal krisis Rohingya pada laporan berbahasa Inggris di website resminya.

“As countries set different standards and norms, any country, organization and group has no right to interfere in and make decision(s) over sovereignty of a country,”.

Panglima militer itu juga menuturkan bahwa Rohingya adalah etnis luar dengan menyebut mereka sebagai Bengalis, atau imigran ilegal dari Bangladesh. Dia bersikeras bahwa UU Kewarganegaraan 1982 di mana menghapus Rohingya dari daftar etnis yang diakui Myanmar akan tetap seperti itu (Utomo, 2018).

### 3. *Speech Acts* oleh Tokoh Budha Nasionalis Myanmar terhadap Rohingya

Disamping kampanye untuk menolak dan mengusir Rohingya dari Myanmar oleh militer, kampanye lainnya tentang kebencian terhadap etnis Rohingya juga dilakukan oleh Budha nasionalis. Salah satunya yaitu Wirathu, seorang Budha nasionalis yang dikenakan sanksi pada maret 2017 lalu atas ujaran kebenciannya yang mengutuk muslim.

Disamping itu, ujaran kebencian juga dilakukan secara masif oleh kelompok Budha-nasionalis melalui jejaring media sosial twitter dan



facebook. Pada agustus 2017 lalu, muncul *hashtags* “Bengali #terrorists” untuk menyebarkan konten kebencian dan menuduh komunitas Rohingya sebagai komunitas besar yang melawan polisi dan pemerintah. Sementara itu, pada April 2018 lalu, Mark Zuckerberg melaporkan kepada senator U.S bahwa Facebook telah mereview ujaran kebencian di Myanmar. Hasilnya, terdapat 1000 contoh konten, komentar buruk, gambar dan video yang menyerang Rohingya dan muslim Myanmar yang dilakukan oleh kelompok Budhanasionalis. Berikut beberapa kutipan ujaran kebencian dari hasil investigasi Reuters:

*“These non-human kalar dogs, the Bengalis, are killing and destroying our land, our water and our ethnic people. We need to destroy their race.”*

*“There is no Rohingya in Myanmar they are only illegal immigrant and terrorists.”*

*“They are Originally Bangalis, Illegally migrants and Land Robbers”*

*“We must fight them the way Hitler did the Jews, damn kalars!”* (Stecklow, 2018)

Terdapat banyak konten yang melakukan ujaran kebencian terhadap etnis Rohingya. Mereka memanggil etnis Rohingya sebagai anjing, pemerkosa, menyarankan agar mereka dijadikan makanan babi, dan memperingatkan pemerintah atau militer untuk menembak etnis Rohingya. Material pada konten facebook tersebut, yang berhasil dikumpulkan oleh reuters juga mengandung gambar pornografi dan anti-muslim.